

Analisis Dampak Model Pertumbuhan Agregat terhadap Kegagalan Pemerintah dalam Pembangunan: Studi Kasus Kebijakan Fiskal di Indonesia

Bryan Rizki Ananda Hakim¹, Alodya Lintang Putri Guna²

¹Politeknik Keuangan Negara STAN; bryan_4121230240@pknstan.ac.id

²Politeknik Keuangan Negara STAN; alin_4121230006@pknstan.ac.id

Info Artikel

Article history:

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli, 2025

Kata Kunci:

Pertumbuhan Ekonomi,
Kebijakan Fiskal, Kegagalan
Pemerintah, Kesejahteraan
Sosial

Keywords:

Economic Growth, Fiscal Policy,
Government Failure, Social
Welfare

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektifitas model pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi kegagalan pemerintah dan ketidakpastian global berdasarkan kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh sebuah negara. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan non-partisipasi dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan PDB sebesar 0,3% setiap penambahan pengeluaran pemerintah sebesar Rp 10 triliun pada metode SOFIE. Sedangkan dengan metode SEMAR menunjukkan peningkatan PDB sebesar 0,0512% setiap pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur sebesar Rp 10,8 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran negara melalui kebijakan fiskal dapat meningkatkan PDB yang berdampak pada kenaikan daya tarik investasi modal asing, penurunan angka kemiskinan, stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of economic growth models in addressing government failure and global uncertainty, drawing on fiscal policies implemented by a country. The method employed is qualitative and descriptive, utilizing non-participatory secondary data sources. The study's results indicate a 0.3% increase in GDP for every additional IDR 10 trillion in government expenditure, as calculated using the SOFIE method. Meanwhile, the SEMAR method shows an increase in GDP of 0.0512% for every additional government expenditure in the infrastructure sector of IDR 10.8 trillion. This indicates that the role of the state through fiscal policy can increase GDP, which has an impact on increasing the attractiveness of foreign investment, reducing poverty rates, stabilizing prices, and improving public welfare.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Bryan Rizki Ananda Hakim

Institution: Politeknik Keuangan Negara STAN

Email: bryan_4121230240@pknstan.ac.id

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, kapasitas produksi nasional menjadi elemen yang sangat penting. Perencanaan pembangunan juga harus dipersiapkan oleh pemerintah dengan menggunakan biaya sekecil mungkin untuk memperoleh output yang maksimal. Pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, hingga kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui jalannya perekonomian pemerintah dapat memanfaatkan indikator ekonomi guna memantau perkembangan dan menentukan kebijakan. Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi salah satu indikator yang cukup tepat untuk menjelaskan perekonomian suatu negara (Husen, 2012).

Sebagai negara maritim dan negara kepulauan dengan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia konsisten meningkatkan PDB hingga empat kali lipat menjadi \$1,4 Triliun selama dua dekade terakhir. Pertumbuhan ekonomi ini juga dapat diukur dengan dimensi tunggal melalui peningkatan produksi dan pendapatan secara agregat. Tujuan dari pertumbuhan ekonomi tak lepas dari peran strategis pemerintah dalam membuat kebijakan. Kebijakan inilah yang berpengaruh besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu, 2024).

Namun, dikutip dari laman IMF, diperkirakan Indonesia akan menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, yaitu 4,7% pada tahun 2025 dan 2026. Angka ini lebih rendah daripada proyeksi pada bulan Januari 2025 yaitu di angka 5,1%. Penurunan ini tak lepas dari melemahnya daya beli masyarakat dan kinerja industri yang menurun (S. R. D. Setiawan, 2025).

Walaupun dihadapkan dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi yang menurun, pemerintah Indonesia terus mendorong ekonomi domestik dan meningkatkan investasi berkelanjutan. Upaya pemerintah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo yang mengedepankan pengembangan SDM agar diperoleh akselerasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tapi solusi pemerintah ternyata tidak menyelesaikan masalah stagnasi pertumbuhan ekonomi. Justru beberapa kebijakan yang diterapkan malah meningkatkan beban konsumsi masyarakat sehingga daya beli semakin melemah.

Tabel 1.1. Produk Domestik Bruto Triwulan I

Tahun	Produk Domestik Bruto pada Laju Pertumbuhan Triwulan I terhadap Triwulan I tahun sebelumnya dalam persen (y-on-y)
2020	2,97%
2021	-0,69%
2022	5,02%
2023	5,04%
2024	5,11%
2025	4,87%

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah, 2025)

Tabel 1.1. menunjukkan bahwa persentase produk domestik bruto mengalami penurunan setelah meningkat dalam 3 tahun terakhir. Penurunan ini terjadi karena imbas kebijakan agresif pemerintah pada program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis ternyata menyebabkan dampak yang luas diantaranya beberapa bantuan subsidi pemerintah yang dikurangi, kecenderungan masyarakat menyimpan uang di bank atas ketidakpastian ekonomi global hingga menurunnya minat investasi asing di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang kondisi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi landasan guna menciptakan kebijakan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan ketidakpastian global. Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik lagi.

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan sumber data sekunder. Selain itu, metode non-partisipasi juga dimanfaatkan guna mendapatkan data tentang “Pengaruh Perencanaan Produksi Agregat terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan

Implikasinya pada Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Kebijakan Fiskal di Indonesia". Data sekunder, seperti artikel, sumber buku, publikasi online, dan jurnal juga digunakan untuk penelitian ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perencanaan Produksi Agregat

Menurut (Nursyanti, 2019), perencanaan agregat artinya perencanaan yang dilakukan secara *gross* atau kasar dalam memanfaatkan sumber daya manusia serta peralatan dan modal yang dimiliki pada fasilitas produksi untuk memenuhi kebutuhan total suatu negara. Perencanaan produksi agregat merupakan strategi penting yang harus dimiliki suatu negara guna mencegah terjadinya stok kosong atau *out of stock* (OOS) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen (Indra, 2017). Terdapat empat sumber daya produktif yang digunakan sebagai indikator perencanaan agregat, yakni jumlah tenaga kerja, jumlah *supplier* dan subkontraktor, biaya produksi, dan tingkat persediaan (Rizkiyani & Rumita, 2016).

2.2 Kegagalan Pemerintah

Kegagalan Pemerintah merupakan kondisi pemerintah yang tidak menjalankan peran utama dalam ekonomi sebagaimana mestinya. Empat peran utama pemerintah diantaranya, peran regulator, peran mengelola ekonomi makro, peran alokasi sumber daya, dan peran kesejahteraan sosial. Kegagalan pemerintah dikelompokkan menjadi dua, yaitu *omission failures* dan *commission failures*. *Commission failures* terjadi karena lembaga pemerintah yang tidak efisien dan biaya operasional yang mahal. Sedangkan *failures of omission* terjadi karena memburuknya sarana prasarana baik transportasi maupun komunikasi yang menyebabkan kenaikan biaya aktivitas sektor publik dan sektor swasta (Sasana, 2004).

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur pembangunan ekonomi berdasarkan peningkatan output dalam satuan waktu (Ma'ruf & Wihastuti, 2008). Lebih lanjut, menurut Syahputra (2017), Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan peningkatan produksi kebutuhan konsumsi baik itu barang maupun jasa perkapita dalam jangka panjang yang diiringi dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Terdapat tiga variabel yang bersinggungan dengan pertumbuhan ekonomi diantaranya, investasi, tenaga kerja, dan pertumbuhan penduduk (Astuti et al., 2017).

2.4 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh melalui intervensi dalam pemberian pelayanan sosial tanpa membedakan golongan atau kelas sosial (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014). Selain itu, menurut Setiawan (2017), terdapat unsur-unsur kesejahteraan sosial, yakni upaya yang terarah dan terpadu, pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku, pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar, sasaran kepada masyarakat Indonesia, serta pendekatan melalui rehabilitasi sosial, pemberian jaminan, dan pemberdayaan sosial.

2.5 Kebijakan Fiskal

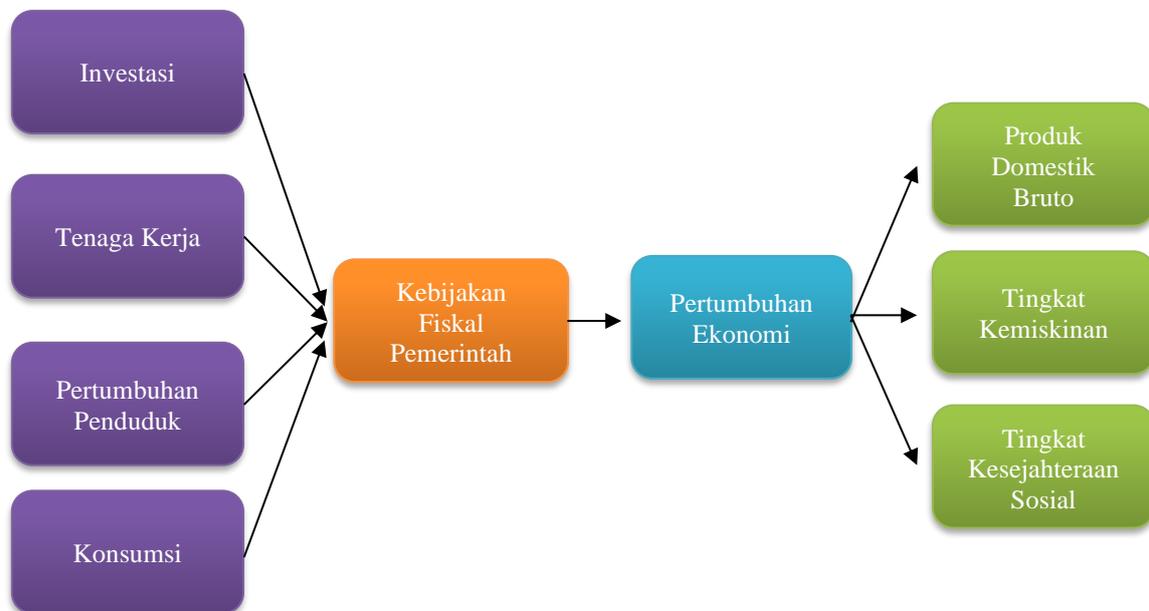
Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah permintaan agregat dalam jangka pendek yang ditujukan untuk mengontrol keseimbangan makroekonomi (Surjaningsih et al., 2012). Selain itu, kebijakan fiskal negara Indonesia juga berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara dalam hal ini tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Silalahi & Ginting, 2020). Kebijakan fiskal juga dapat mendorong negara keluar dari kondisi krisis jika dilakukan secara ekspansif melalui insentif fiskal dan peningkatan belanja negara (Sari et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Dalam ekonomi makro, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dapat digambarkan dari jumlah pengeluaran konsumsi akhir (C), Total Investasi (I), Total pengeluaran pemerintah (G), dan selisih dari ekspor dan impor (X-M). Teori ini juga menggambarkan bahwa PDB merupakan bagian dari ekonomi terbuka. Teori ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dalam hal ini yang tercermin dari peningkatan PDB Indonesia.

$$PDB = C + I + G + (X-M)$$

Konsumsi akhir yang biasanya dilakukan oleh rumah tangga harus didorong agar masyarakat tidak cenderung menyimpan hartanya sehingga dapat menurunkan rantai perputaran ekonomi. Kemudian, Investasi dapat ditingkatkan melalui transaksi pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk modal fisik dan produksi oleh pihak swasta. Selanjutnya, total pengeluaran pemerintah yang dapat diwujudkan melalui belanja barang, jasa, dan modal negara maupun gaji pegawai. Pengeluaran pemerintah ini juga dipengaruhi oleh kebijakan fiskal yang diatur guna menyesuaikan kondisi negara sehingga dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah nilai ekspor bersih yang diukur dengan komposisi seberapa besar barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan dijual ke luar negeri dikurangi oleh seberapa besar barang dan jasa yang dibeli dari luar negeri.

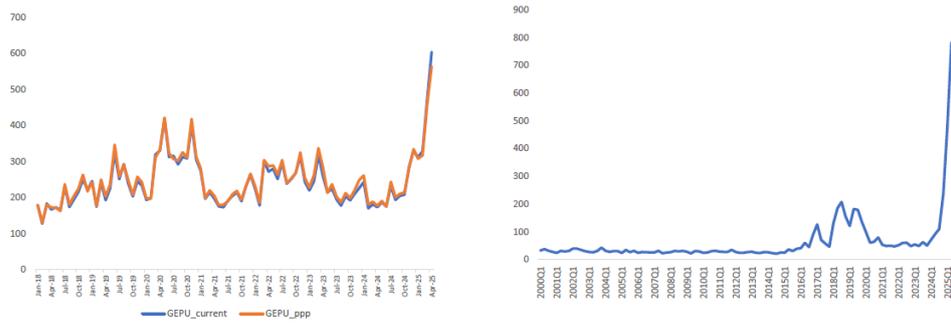


Gambar 3.1. Diagram Kerangka Konseptual

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kegagalan Pemerintah dalam Pembangunan

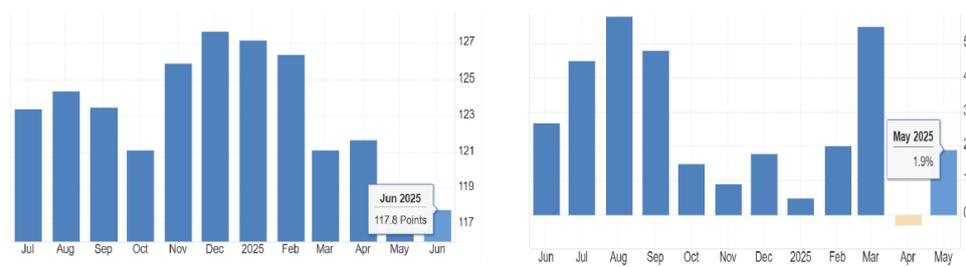
Pemerintahan suatu negara idealnya dipimpin oleh birokrat dan politisi yang berfokus pada kepentingan bersama. Tetapi, dalam realitanya negara berkembang cenderung memiliki tingkat kegagalan pemerintah yang tinggi, yaitu kondisi ketika pemangku kepentingan dalam pemerintahan memaksimalkan kepentingan pribadi sehingga akan semakin memperburuk kondisi ekonomi suatu negara.



Gambar 4.1. Global Economic Policy Uncertainty Index 2018-2025 (kiri) dan Trade Policy Uncertainty Index 2000-2025 (kanan)

Sumber: policyuncertainty, Tauhid Ahmad (INDEF)

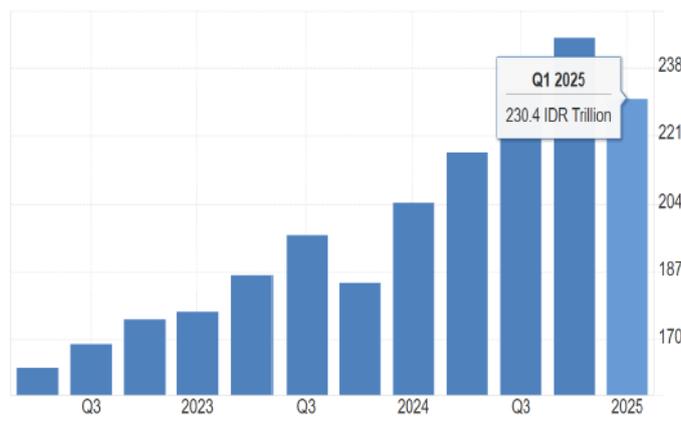
Gambar di atas menunjukkan adanya konflik geopolitik global yang ternyata sangat berpengaruh signifikan terhadap risiko ekonomi dunia tak terkecuali di Indonesia. Keterbatasan pemerintah mengatasi kondisi ini dapat berimbas kepada guncangan ekonomi domestik dan tata kelola negara (Ahmad, 2015).



Gambar 4.2. Indeks Keyakinan Konsumen (kiri) dan Indeks Penjualan Ritel (kanan)

Sumber: tradingeconomics, Tauhid Ahmad (INDEF)

Data di atas juga menunjukkan bahwa pada tahun 2025 telah terjadi penurunan signifikan daya beli masyarakat, penjualan ritel dan menyusutnya kelas menengah. Hal ini menjadi indikasi peran pemerintah dalam merangsang permintaan internal dan sektor rill belum optimal. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap *merit goods* (misalnya pendidikan dan kesehatan) dapat menjadi faktor utama melemahnya daya beli masyarakat.



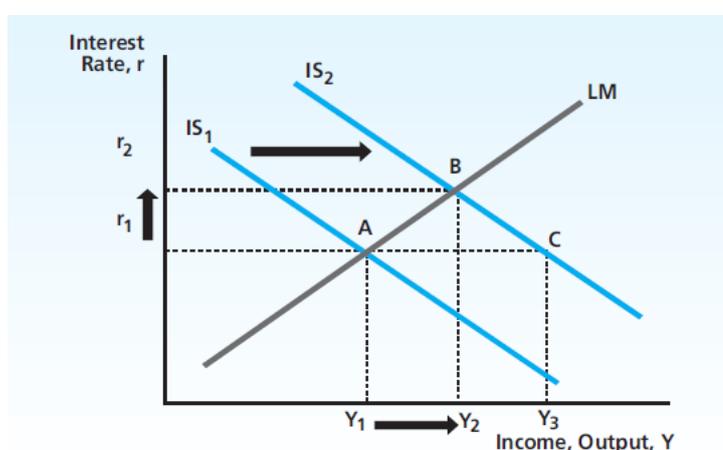
Gambar 4.3. Penanaman Modal Asing

Sumber : tradingeconomics, Tauhid Ahmad (INDEF)

Selain entitas ekonomi domestik, investor modal asing juga menunjukkan penurunan daya tarik atau kepercayaan atas prospek ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan peran pemerintah yang kurang sigap dalam merespon ketidakpastian global untuk tetap menjaga lingkungan investasi yang stabil dan menarik. Jika hal ini tidak segera ditangani, penurunan PMA dapat menghambat mobilisasi sumber daya dan alokasi pembangunan yang efektif dan efisien.

4.2 Efektifitas Kebijakan Fiskal terhadap Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan fiskal merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengatur sistem perpajakan dan belanja negara guna mengatasi masalah ekonomi. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, implementasi kebijakan fiskal harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan efisien. Berdasarkan pendekatan Keynesian, pemotongan pajak dan peningkatan pengeluaran pemerintah mempunyai efek berganda karena dapat merangsang peningkatan permintaan barang konsumsi rumah tangga.



Gambar 4. 4, *Crowding Out Effect*

Berdasarkan model IS-LM yang dikemukakan oleh Keynes, peningkatan pengeluaran pemerintah akan menstimulasi pergeseran kurva IS ke kanan dan membentuk titik keseimbangan baru. Titik keseimbangan baru ini diiringi oleh peningkatan pendapatan yang juga menyebabkan kenaikan suku bunga. Peningkatan suku bunga ternyata dapat berdampak pada permintaan terhadap *real money balance* yang meningkat sehingga juga merangsang peninjauan ulang investor terhadap rencana investasinya. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini sudah dikembangkan oleh Bank Indonesia menjadi SOFIE (model makroekonometri) dan SEMAR (model Computable General Equilibrium). Berdasarkan data input dan output pada tahun 2005, kenaikan pengeluaran pemerintah (konsumsi atau investasi) sebesar Rp 10 triliun akan meningkatkan PDB sebesar 0,3% di model SOFIE. Sedangkan pada model SEMAR, penambahan sebesar Rp 10,8 triliun pada program infrastruktur akan mendorong kenaikan PDB sebesar 0,0512% (Amin, 2015).

Kebijakan fiskal yang ekspansif berupa penurunan pajak, peningkatan subsidi barang tertentu, dan pengurangan tarif pajak konsumsi, juga dapat mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga sekaligus memengaruhi keputusan konsumsi. Selain itu, dengan adanya insentif pajak, akan mendorong investasi swasta dan akan menciptakan lingkungan industri yang lebih strategis. Kebijakan fiskal ini juga menjadi jawaban atas meningkatnya jumlah penduduk di usia produktif sehingga dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga. Pertumbuhan penduduk yang meningkat akan berimbas pada tenaga kerja usia produktif yang membludak. Kondisi ini dapat diatasi dengan pemberian

insentif dan dukungan pemerintah melalui program bantuan langsung berupa “sekolah siap kerja”.

4.3 Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Sosial

Kebijakan fiskal juga memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi dan kestabilan harga. Bantuan langsung yang diberikan pemerintah pada sektor pertanian yang tepat sasaran akan menciptakan perputaran roda ekonomi yang cenderung lebih stabil. Selain itu, kebijakan fiskal tentunya tak lepas dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan daya beli masyarakat akan bersinggungan dengan berkurangnya angka kemiskinan. Kesejahteraan dapat dicapai oleh masyarakat jika beberapa indikator, seperti hidup bahagia dengan keterampilan hingga kemampuan partisipasi aktif dalam masyarakat terpenuhi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, Kegagalan pemerintah sangat rentan terjadi di negara berkembang tak terkecuali di Indonesia. Kegagalan pemerintah ini terjadi akibat keserakahan pemangku kepentingan atas pemenuhan kepentingan pribadi mereka. Apabila perbaikan kebijakan dan tata kelola diarahkan dengan tujuan kepentingan bersama, maka permasalahan ekonomi domestik akan lebih mudah terselesaikan. Penerapan kebijakan fiskal merupakan salah satu peran pemerintah yang dapat dimaksimalkan. Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam memengaruhi permintaan secara agregat. Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat merangsang konsumsi rumah tangga dan membuka peluang investasi modal asing sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan menjadi jawaban untuk menghadapi kondisi ketidakpastian global. Keterbatasan penelitian ini adalah masih menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan non-partisipasi. Sehingga untuk peneliti berikutnya disarankan dapat mengembangkan penelitian dengan metode yang lebih baik guna memperoleh hasil yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T. (Institute for D. of E. and F. (2015). *Perekonomian Global Tahun 2025*.
- Amin, N. (2015). *DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP OUTPUT DAN INFLASI*. 69–98.
- Astuti, W. A., Hidayat, M., Darwin, R., Ekonomi, F., & Riau, U. M. (2017). Pengaruh Investasi , Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pelalawan Effect of Investment , Labor and Population Growth on Economic Growth in Pelalawan Regency. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 7.
- Husen, S. (2012). Pengaruh Pengeluaran Agregat dalam Mendorong Pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan Implikasinya pada Kesejahteraan Sosial Oleh : Sharifuddin Husen (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya Jakarta). *Jurnal Ekonomi*, 14(3), 216–246.
- Indra, H. (2017). STRATEGI PERENCANAAN AGREGAT SEBAGAI PILIHAN KAPASITAS PRODUKSI. *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 5(1).
- Kemenkeu. (2024). *Capaian Transformasi Ekonomi Indonesia: PDB Meningkatkan Empat Kali Lipat dan Kemiskinan Turun Signifikan dalam Dua Dekade*.
- Ma’ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44–55.
- Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5 (2), 157–164.
- Nursyanti, Y. (2019). MINIMASI BIAYA PRODUKSI PADA PRODUK WINKER RELAY MELALUI PERENCANAAN PRODUKSI AGREGAT. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 143–152.
- Rizkiyani, D., & Rumita, R. (2016). PERENCANAAN PRODUKSI AGREGAT PRODUK FLOORING PADA PERUM PERHUTANI INDUSTRI KAYU BRUMBUNG. *Industrial Engineering Online Journal*, 5 (1)(October 2014).
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap

- Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1–10.
- Sasana, H. (2004). Kegagalan Pemerintah Dalam Pembangunan. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 1(1), 31–38.
[http://eprints.undip.ac.id/13958/1/Kegagalan_Pemerintah_Dalam_Pembangunan....by_Hadi_Sasana_\(O_K\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/13958/1/Kegagalan_Pemerintah_Dalam_Pembangunan....by_Hadi_Sasana_(O_K).pdf)
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan kemiskinan melalui pusat kesejahteraan sosial. *Sosio Informa*, 3 (3)(200), 273–286.
- Setiawan, S. R. D. (2025). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2025 Diprediksi Melemah, Mengapa?* Kompas.Com.
- Silalahi, D. E. S., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jesyra (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167.
<https://doi.org/10.36778/jesyra.v3i2.193>
- Surjaningsih, N., Utari, G. A. D., & Trisnanto, B. (2012). DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP OUTPUT DAN INFLASI. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 14(4), 353–470.
- Syahputra, R. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 108–119. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.2089>